|  |
| --- |
| **Sosialisasi, Budaya, dan Ekonomi Politik di Indonesia** |
| Sistem politik bertahan dan mengubah dirinya dalam masyarakat melalui sosialisasi politik. Melalui sosialisasi politik, masyarakat memiliki seperangkat pengetahuan dan seperangkat nilai yang diperlukan untuk mendukung atau mengubah sistem politik. Secara umum, sosialisasi terjadi melalui tiga proses yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Kognitif adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, dan ketika pikiran seseorang terpengaruh oleh pengetahuan itu maka ini disebut proses afektif dan ketika proses penilaian terjadi maka ini adalah proses evaluatif. Sosialisasi berkembang melalui agen-agen seperti keluarga, kelompok pertemanan, partai politik, kelompok kepentingan, media massa. Sejauh mana agen-agen ini dapat mempengaruhi preferensi politik seseorang dapat dilihat seberapa dekat jangkauan agen, tingkat pendidikan dan juga lingkungan dimana seseorang itu tinggal.  Sosialisasi politik akhirnya membentuk budaya politik. Budaya politik adalah persepsi, pola tingkah laku dan orientasi individu terhadap sistem politiknya. Budaya politik parokial terjadi pada masyarakat tradisional yang ditandai dengan rendahnya minat anggota masyarakat terhadap politik. Budaya politik kaula/subjek ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas politik namun belum memiliki perhatian atas aspek input dan kesadarannya sebagai aktor politik. Sedangkan budaya politik partisipan ditandai dengan keaktivannya dalam kehidupan politik.  Di Indonesia, sosialisasi politik yang membentuk budaya politik era parlementer berkembang nilai-nilai liberal. Pengaruh demokrasi ala barat yang dilakukan elit-elit Indonesia menumbuhkan pola perilaku yang mengarah pada kebebasan individu untuk menyatakakan pendapat, aspirasi dan kepentingan. Pola ini melahirkan kondisi tumbuh berkembangnya kontestasi politik antarpartai ataupun antargolongan dalam sistem politik Indonesia. Era demokrasi terpimpin, sosialisasi bersifat satu arah karena ketiadaan konflik akibat kepemimpinan kuat dari Soekarno. Tidak ada mosi tidak percaya karena legislatif saat itu tunduk di bawah kehendak Presiden. Era Orde Baru nilai-nilai Orde Baru dikembangkan dan diwariskan dalam konteks demokrasi Pancasila dan kontestasi politik yang rendah, cenderung stabil, namun bersifat hegemonik. Sedangkan pasca Orde Baru, perluasan partisipasi rakyat meningkat tajam karena nilai-nilai liberalisme membuka keran politik dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk terlibat dalam politik.  Ekonomi politik berbeda dengan sosialisasi dan budaya politik yang menekankan pada nilai-nilai dalam masyarakat. Ekonomi politik lebih menekankan kepada motif dalam perilaku masyarakat atau sistem dalam politik. Ekonomi politik membahas sejauhmana peran negara atau pemerintah dalam sistem ekonomi. Jika perannya kecil maka ekonomi cenderung kapitalis dan sebaliknya jika peran pemerintah besar maka ekonomi cenderung sosialis.    Ekonomi politik Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan signifikan. Budaya politik liberal turut memengaruhi bagaimana ekonomi dijalankan era Parlementer. Seringnya kabinet berganti menyebabkan arah pembangunan ekonomi yang berbeda-beda. Namun demikian, urgensi nasionalisasi perusahaan asing dan membina kewiraswastaan Indonesia menjadi tujuan utama. Era ekonomi terpimpin menandai kepemilikan negara atas semua sektor ekonomi. Kebijakan yang terkenal di masa ini adalah Berdikari yang anti modal asing serta meminimalkan penguasaan ekonomi oleh pedagang etnis tionghoa . Namun di akhir pemerintahan, Soekarno justru melakukan stabilisasi ekonomi melalui mekanisme pasar bebas meski kemudian dicabut. Era Orde Baru yang mewarisi ekonomi ambruk menerapkan model ekonomi liberalis dengan menekankan pada investasi asing dan pinjaman modal dengan minyak sebagai jaminannya. Agar pembangunan ekonomi stabil maka diperlukan stabilitas politik dan konsekuensinya gejolak politik rakyat harus dibungkam. Kebijakan ekonomi teknokratik ini menimbulkan korupsi, ketergantungan modal asing khususnya Barat dan Jepang, membangun oligarki dengan aktor militer, pejabat pemerintah dan pengusaha etnis tionghoa. Era pasca Orde Baru, arah kebijakan ekonomi masih liberalis. Meskipun masih mengandalkan modal dan pinjaman asing namun ketergantungan minyak sudah jauh berkurang, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tidak bersifat semu, serta pembangunan infrastruktur juga pendidikan dan kesehatan menjadi fokus dari kebijakan pemerintah saat ini. |